

BAB V

PERUBAHAN DUKUNGAN PARTAI GOLONGAN KARYA PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014

5.1 Model Koalisi Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Presiden 2014

Telah muncul bahwa sejak terbentuknya kolasi cabinet pada pemerintahan SBY hingga oemerintahan Jokowi, dan memiliki kaitan erat dengan terbentuknya sistem pemerintahan presidensial yang telah dianut oleh Indonesia dalam konstitusi (Ufen, 2018). Perubahan pada peta koalisi di Indonesia kemudian mengalami perkembangan, dan nampaknya hal ini disebabkan oleh terbentuknya sistem pemerintahan presidensial, yang dimana kekuatan dimiliki oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga jika adanya dan terjadinya perubahan pada peta koalisi yang sebelumnya oposisi, kemudian menjadi berkoalisi pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Koalisi Partai Golongan Karya Pada Tahun 2004

Kemenangan SBY pada pemilihan umum tahun 2004 dengan membentuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), yang didalamnya terdapat koalisi besar yaitu adanya Partai Golkar, PAN, PPP, PKB, Partai Bintang Reformasi dan Partai Pelopor (Kholis, 2020). Keberhasilan Jusuf Kalla mengambil alih posisi Ketua Umum Golkar pada awal 2005, menguatkan koalisi ini. Membangun Kabinet Indonesia Bersatu, koalisi semakin meluas dengan melibatkan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB), Partai Bintang Reformasi (PBR), serta Partai Pelopor. Keberhasilan Jusuf Kalla mendapatkan jabatan Ketua Umum Golkar pada awal tahun 2005, memperkuat aliansi ini. Pemerintah juga mendapat dukungan yang besar dan kuat dalam badan legislatif. Sepuluh partai yang hadir dalam Kabinet menguasai 420 (76,4%) seats in the House of Representatives. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dan Lima partai kecil lainnya, yang tidak tergabung dalam pemerintahan, hanya menguasai 130 (23,6%) kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

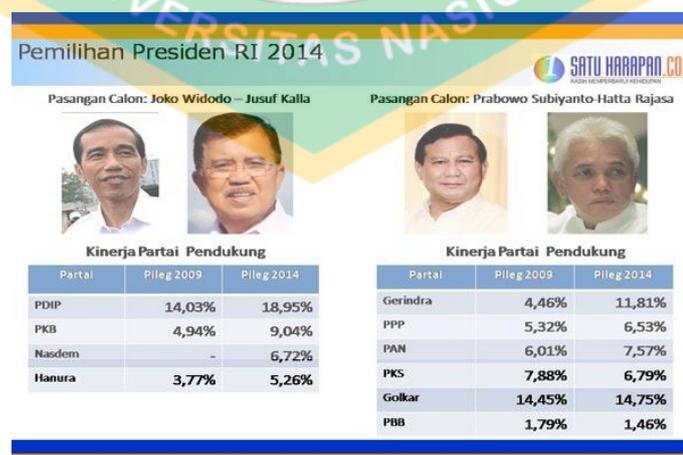
Koalisi yang terbentuk pada waktu tersebut bersifat tidak permanen, nampaknya bahkan memiliki kecenderungan akan berdampak pada disharmonisasi atau adanya ketidakselarasan hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Hal ini akan memiliki dinamika baru, yaitu terjadinya partai politik yang mendukung pemerintahan tidak akan selalu mendukung berbagai kebijakan atau undang-undang yang dirancang oleh pemerintah. Terdapat persoalan yang terjadi pada masa SBY-JK, yaitu adanya keretakan koalisi partai politik akibat dari terkait kasus *bailout* Bank Century, yang melibatkan berbagai kalangan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Golkar pada hak angket Bank Century. Partai Golkar cukup proaktif agar kasus Bank Century diungkap hingga selesai, karena hal ini cukup meresahkan masyarakat dan terdapat berbagai tanggapan public yang negatif terhadap kinerja pemerintah dan partai politik. Demikian halnya kubu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional.

Koalisi Partai Golongan Karya Pada Tahun 2009 dan 2014

Ketua Umum partai Golongan Karya Aburizal Bakrie memerintahkan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat yang mengikuti proses dalam Panitia Khusus Hak Angket Bank Century pada tahun 2009 untuk segera mengusut hingga tuntas dan selesai perkara tersebut, sehingga mendapatkan penyelesaian yang konkrit dan transparan dihadapan publik. Hal ini menunjukkan bahwa koalisi yang telah dibangun Susilo Bambang Yudhoyono dan Partainya yaitu Partai Demokrat dengan partai-partai anggota koalisi lain mengalami keretakan dan disharmonisasi (Haris, 2007).

Pada pemilihan presiden tahun 2014, koalisi Partai Golkar sebelum Pilpres jatuh kepada pasangan capres-cawapres yaitu Prabowo-Hatta Rajasa, dan hal ini memang sudah menjadi kesepakatan pada Rapimnas Partai Golkar tahun 2014. Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2009-2014, Aburizal Bakrie, menyatakan bahwa bertemu dengan Prabowo untuk mendiskusikan mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia kedepannya cukup sulit. Prabowo dan ARB memiliki kesamaan kesepahaman bahwa tantangan Indonesia kedepan dapat diatasi oleh pemimpin dan memiliki kepemimpinan yang hebat, serta memiliki pengaruh besar untuk mengambil suara hati masyarakat. ARB menyatakan bahwa, kepemimpinan yang hebat ini hanya dimiliki oleh Prabowo-Hatta Rajasa, sehingga Partai Golkar pada saat itu memilih untuk berkoalisi dengan Koalisi Merah Putih (KMP) pada pemilihan presiden tahun 2014.

Prabowo Subianto pun menegaskan bahwa dukungan ARB kepada dirinya, bahwa pilihan Partai Golkar ini memang biasa menentukan pilihan koalisi di penghujung, karena Partai Golkar sebagai partai yang besar tentu akan menentukan arah dan masa depan Indonesia, artinya peran Partai Golkar bagi negara itu sangat diperhatikan. Akan tetapi, hal ini juga tentu tidak semata-mata hanya berupa dukungan saja, disisi lain para pemimpin partai tersebut yang masuk dalam KMP tentu memiliki “permintaan politik atau jatah politik” pasca pemilihan presiden, karena hal ini adalah momentum yang pas untuk partai sebesar Golongan Karya menempati kursi-kursi Menteri dan jabatan politik strategis di pemerintahan. Koalisi Merah Putih atau disingkat dengan KMP ini merupakan koalisi partai politik yang mendukung Prabowo-Hatta Rajasa, antara lain partai yang mendukung itu : Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, PBB dan Partai Golongan Karya. Sedangkan, koalisi yang dibangun oleh Jokowi-JK adalah Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dengan dukungan partai politik yaitu : PDIP, Hanura, Nasdem, dan PKB. Tentu jika dilihat dari presidential threshold sudah memenuhi koalisi partai politik tersebut.



Gambar 5. 1 Koalisi Partai Politik Pada Pilpres 2014

Mengenai adanya perubahan dukungan dan koalisi Partai Golongan Karya dari Prabowo ke Jokowi, maka perlu diketahui yang menjadi proses dan dinamika Partai Golongan Karya ketika memilih berkoalisi dengan KMP dan mendukung Prabowo-Hatta itu berawal dari RAPIMNAS VI Partai Golongan Karya pada Mei 2014 di JCC Jakarta. Hasil RAPIMNAS VI Partai Golongan Karya tersebut menentukan arah koalisi Partai Golongan Karya, yang memberikan mandat penuh terhadap Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum, untuk menentukan kemana arah koalisi Partai Golongan Karya. Pasca RAPIMNAS tersebut, ARB menemui Megawati untuk membicarakan jika Partai Golongan Karya berkoalisi dengan KIH, karena pada saat itu PDIP adalah pimpinan koalisi. Sebagai Ketua Umum partai besar, ARB tentu mendatangi pimpinan koalisi dengan tangan kosong, ada beberapa hal yang disampaikan ARB kepada Megawati terkait dengan kursi-kursi politik dalam proses pemenangan pilpres Jokowi-JK, akan tetapi nampaknya terdapat penolakan dari Megawati terkait dengan permintaan ARB mengenai kursi politik tersebut. Akhirnya, setelah menemui Megawati, ARB hendak bergegas menemui Prabowo sebagai pimpinan koalisi KMP dan pimpinan Partai Gerindra, untuk membahas kursi-kursi politik yang akan diberikan kepada Partai Golongan Karya jika ikut berkoalisi dan memenangkan pilpres Prabowo-Hatta. Hasil dari pertemuan ARB dengan Prabowo, menunjukkan adanya respon positif, sehingga apa yang diinginkan oleh ARB dan Prabowo ada kesamaan visi dan misi, serta adanya bargaining politik yang telah mencapai kesepakatan, termasuk kursi-kursi di Kementerian untuk

Partai Golongan Karya. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Tantowi Yahya¹, sebagai berikut :

“Jadi terhadap keikutsertaan atau bergabungnya kita ke koalisinya PDIP itu kita ada syarat juga lah. Kita minta ini, ini, ini. Gak bisa kasih cek kosong. Karena ini partai terbuka, partai milik banyak orang. Nah ternyata persyaratan ini membuat Ibu Megawati tersinggung. Katanya itu. Jadi di dalam rapat itu Ibu Megawati bilang ya kalau mau gabung, gabung aja. Gak usah dikte. Minta macam-macam saya ngerti lah harus kasih apa gitu. Pak Ical sebagai Ketua Umum dari partai besar, dia gak terima juga digituin kan. Golkar partai besar, partai kedua terbesar, pemenang pemilu setelah Demokrat, dan dia gak bisa melapor ke RAPIMNAS bahwa saya terima tawaran dari Ibu Megawati tanpa syarat. Ini kan gak bisa. Kalau misalnya Pak Ical melakukan itu dia digugat di RAPIMNAS. Gak bisa lah. Gak boleh minta ini, itu yang saya gak tau. Apa yang dipinta oleh Pak Ical saya gak tau. Tapi yang jelas itu membuat Ibu Megawati tidak berkenan. Dia membandingkan dengan partai-partai lain yang bergabung tanpa syarat. Ya silahkan lah partai lain tapi Golkar sebagai partai besar, partai yang tertua itu gak bisa gitu. Jadi Pak Ical akhirnya memutuskan. Memutuskan bergabung dengan, cuman ada koalisi. Koalisinya ya, koalisi Prabowo itu. Akhirnya karena opsinya gak ada, daripada kita tidak kemana-mana. Lebih bagus bergabung ke koalisi Merah Putih. Dan calon presiden Prabowo yang sudah lama minta Golkar gabung ke situ. Yaudah akhirnya Pak Ical ngontak Prabowo, ketemu Prabowo, terjadilah deal gitu. Karena sekali lagi opsinya cuman dua, cuman dua calon presiden. Nah di koalisinya Prabowo, persyaratan-persyaratan Pak Ical dari Golkar itu diterima”

Hasil RAPIMNAS VI Partai Golongan Karya akhirnya setelah memberikan mandat penuh kepada ARB sebagai Ketua Umum untuk menentukan arah koalisi, partai Golongan Karya menempatkan koalisi terhadap Koalisi Merah Putih yang mendukung kemenangan Pemilihan Presiden Prabowo-Hatta pada tahun 2014. Hal ini tidak lain adanya bargaining politik antara Partai Golongan Karya dengan

¹ Wawancara dengan Tantowi Yahya, selaku Jubir Partai Golongan Karya masa Ketua Umum ARB 2009-2014, pada Kamis 23 Januari 2025 Pukul 13.30 WIB melalui zoom meeting

Prabowo yang mencapai kesepakatan. Akan tetapi, disisi lain, nampaknya dalam proses hasil RAPIMNAS tersebut sudah mulai banyak penolakan, bahwa koalisi Partai Golongan Karya seharusnya tetap melihat apakah kader Partai Golongan Karya masuk dalam pusaran pemilihan presiden atau tidak. Karena, salah satu kesepakatan RAPIMNAS tersebut adalah seharusnya yang menjadi capres ataupun cawapres adalah Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum, dan hasil RAPIMNAS juga menegaskan bahwa jika terdapat kader Golkar yang ingin maju sebagai capres atau cawapres diluar rekomendasi partai Golkar, sebaiknya hendak keluar dari Partai Golkar dan melepaskan jabatannya. Hal ini menjadi awal mula adanya keretakan sikap politik para kader partai Golongan Karya terhadap koalisi. Disamping itu juga, keterlibatan Partai Golongan Karya pada KMP menuai protes keras dan kontroversi, antara lain :

1. Partai Golkar adalah partai peraih suara terbanyak kedua sehingga secara politik tidak balance dengan mendukung Prabowo Hatta yang perolehan suara partainya berada dibawah Partai Golkar.
2. Koalisi dengan Prabowo-Hatta bukan didasarkan atas kesamaan ideologi dan idelaisme partai, melainkan atas dasar *power-seeking*, yakni dengan adanya tawar menawar posisi Menteri untuk ARB dan posisi strategis lainnya dalam jajaran cabinet.
3. Bagi Sebagian kader Partai Golkar, mendukung Jusuf Kalla jauh lebih rasional dan prosoektif, karena JK pernah menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar dan telah berjasa membesarkan Golkar, dan juga kedekatan emosional JK dengan para kader Golkar masih efektif.

Namun demikian, pertimbangan ini dinilai sangat diabaikan oleh ARB, dan suara kritis dan penolakan kader terhadap kebijakan berganbung dnegan KMP justru dilawan secara brutal dengan memecat para kader yang mendukung Jokowi-JK, yakni Agus Gumiwang, Poempida Hidayatullah, Nusron Wahid.

Pada penghujung penentuan koalisi Partai Golongan Karya yang akhirnya menempatkan diri pada koalisi KMP, terjadilah dinamika pada saat penentuan Cawapres dari KIH adalah Jusuf Kalla, yang merupakan tokoh, senior, dan kader Golongan Karya, yang menempatkan keputusan pribadinya untuk masuk dalam bursa cawapres melalui KIH Bersama Jokowi, bukan masuk dalam bursa KMP bersama Prabowo. Sehingga terjadinya perpecahan suara dan sikap politik kader partai Golongan Karya terhadap pilpres. Karena, majunya Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi ini adalah Keputusan pribadi, tanpa dukungan dari Partai Golongan Karya, akna tetapi disisi lain juga perlu diketahui bahwa Jusuf Kalla merupakan tokoh besar di daratan Sulawesi, ketokohnya patut untuk menjadi referensi KIH pada saat itu akhirnya memilih Jusuf Kalla sebagai Cawapresnya, dan juga masih memiliki banyak loyalis dan kader-kader yang dapat mendukung Jusuf Kalla pada pilpres 2014, inilah yang menjadi awal mula berangsur mulainya perpecahan dan perbedaan sikap politik didalam internal partai Golkar. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Prof. Ganjar Razuni², sebagai berikut :

² Wawancara dengan Prof. Ganjar Razuni, selaku kader Partai Golongan Karya dan Sekretaris Dewan Pakar Partai Golongan Karya (2016-2019 dan 2019-2024) pada Senin, 3 Februari 2024 Pukul 11.00 WIB di Kantor DPP Partai Golongan Karya

“Nah kemudian perlu diketahui bahwa pemenang pemilu pada saat itu Pilpres adalah Pak Jokowi bersama Pak Jusuf Kalla. Sedangkan Golkar secara resmi pada waktu itu tidak mendukung Pak Jokowi dengan Pak Jusuf Kalla tapi mendukung Pak Prabowo dengan Pak Hatta Rajasa sebagai capres dan capresnya. Itu keputusan resmi organisasi. Nah, memang pada waktu itu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di dalam lingkungan Partai Golkar. Sehingga suara Golkar pun tidak utuh. Mengapa demikian? Bagi Golkar saat itu melihatnya bahwa Pak Prabowo bukan kader Golkar, walaupun dulu pernah di Golkar, dan Pak Hatta Rajasa itu jelas kader PAN, dan Pak Prabowo sebagai ketua Dewan Pembina Gerindra. Jadi tidak ada unsur Golkar di situ. Maka di Golkar pun terjadi perpecahan. Mereka sebagian besar juga mungkin dalam hal hampir sama mendukung Pak Jokowi Jusuf Kalla, alasannya karena ada Pak Jusuf Kalla adalah Mantan Ketua Umum Partai Golkar. Nah, itulah terjadi perpecahan itu. Nomor tiga Mengapa Partai Golkar pada awalnya berkoalisi dengan Prabowo? Sudah, kan jelas. Itu adalah keputusan partai. Tapi perlu diketahui keputusan partai itu boleh dikatakan apa ya dalam tanda kutip ada hal untuk itu biasa dalam politik ya ya dalam tanda kutip agak dipaksakan ada mekanisme yang terlewat tapi sudah lah itu keputusannya partai Prabowo calon presiden di 2014 dan Jusuf Kalla adalah Jusuf Kalla tidak di situ, Cawapres adalah Pak Hatta Rajasa jadi tidak ada kader Golkar di situ sama sekali, Itulah yang membuat keresahan sebetulnya pada waktu itu ya.”

Namun, dalam konteks Indonesia, komposisi mayoritas dalam kubu oposisi sangat sulit bertahan lama (Kunkunrat & Priangani, 2019). Partai-partai politik di Indonesia lebih nyaman dan terbiasa dalam barisan partai pendukung pemerintah. Dalam hal ini dapat dilihat peta koalisi partai politik sebelum dan sesudah Pilpres Tahun 2014. Pada saat pencalonan Presiden dan wakil Presiden dalam Pilpres tahun 2014 terdapat pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Hatta Radajsa yang didukung oleh Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PKS, Partai Demokrat dan PPP dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang didukung oleh PDI-P, Partai Nasdem dan PKB. Peta dukungan ini menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan

Hatta Radjasa didukung oleh 353 kursi atau 63 persen kursi DPR dan Pasangan Joko Widodo-Jusud Kalla didukung oleh 207 atau 37 persen kursi DPR RI. Artinya, mayoritas partai politik atau kursi parlemen mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta. Namun, hasil Pilpres menyatakan bahwa pemenang pemilihan Presiden tahun 2014 adalah pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla atau dapat dikatakan pasangan calon yang didukung oleh partai dengan kursi minoritas di DPR RI. Dari sini juga menunjukkan bahwa partai oposisi akan menjadi penguasa di parlemen. Dengan estimasi 63 persen oposisi berbanding 30 persen kursi partai pendukung pemerintah. Koalisi mayoritas partai oposisi sangat mungkin terjadi di Indonesia karena dalam sistem presidensial seorang Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga Presiden yang terpilih dapat saja berasal dari koalisi minoritas.

Dalam hal ini dapat diambil contoh dalam pemilihan Presiden/wakil Presiden tahun 2014 dimana koalisi tiga partai (PDI-P, Partai Nasdem dan PKB) dapat memenangkan Pilpres dan mengalahkan koalisi partai yang memiliki kursi mayoritas yang meliputi Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS dan Partai Demokrat (Romli, 2018; Ekawati, 2019). Komposisi kursi mayoritas yang dimiliki oleh partai oposisi tentu menjadi koalisi yang sangat mengkhawatirkan pemerintah. Sebab, akan banyak kebijakan pemerintah yang akan kandas ditangan partai oposisi saat berada dalam pembahasan di DPR. Peta koalisi partai politik tersebut ternyata mengalami perubahan yang signifikan pasca pelantikan Presiden. Partai-partai yang berada dalam barisan oposisi berpindah atau bergabung dengan partai pendukung pemerintah. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara tegas menyatakan berada dalam barisan pendukung

pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Siboy, 2021). Dengan kultur yang demikian maka sangat sulit diharapkan bahwa kubu koalisi oposisi akan menduduki kubu mayoritas.

Berdasarkan model koalisi partai politik khususnya dalam partai Golongan Karya ini, maka dapat diuraikan melalui perspektif menurut Heywood, ada empat arena dalam koalisi partai yang berada dalam lingkup yang berbeda, yaitu koalisi elektoral, koalisi legislatif, koalisi pemerintahan, dan koalisi besar atau pemerintahan nasional. Studi tentang koalisi diperlukan untuk memahami keterikatan aktor-aktor politik dalam membangun suatu kolektivitas. Michael Laver melihat perspektif teori pilihan-rasional melalui dua pendekatan umum menjelaskan mengapa partai-partai politik melakukan koalisi, yaitu *office-seeking* dan *policy-seeking*. Karee Storm menambahkan satu perspektif lagi, yaitu *vote-seeking*. Sementara itu, William Riker mengasumsikan bahwa koalisi partai politik didorong dengan hasrat untuk mendapat kekuasaan pemerintahan, dalam ranah eksekutif maupun legislatif.

Dalam ilmu politik, secara garis besar koalisi dikelompokkan atas dua kelompok. Pertama, *policy blind coalition*, yaitu koalisi yang tidak didasarkan atas pertimbangan kebijakan, tetapi untuk memaksimalkan kekuasaan (*office seeking*). Kedua, *policy-based coalitions*, yaitu koalisi berdasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasikan (*policy seeking*). Konflik internal partai politik di Indonesia terjadi yang disebabkan oleh faktor koalisi karena koalisi yang dibangun berdasarkan *office seeking*. Dengan model koalisi seperti ini maka perilaku partai dalam membangun koalisi lebih didasarkan pada kehendak untuk

memperbesar peluang dalam memperoleh posisi di kabinet atau pemerintahan yang akan terbentuk. Koalisi yang terbentuk atas dasar *office seeking* akan rapuh karena berdasarkan pertimbangan pragmatis-jangka pendek.

Penulis akan menguraikan untuk melihat bagaimana model koalisi Partai Golongan Karya pada tahun 2014 yang terlihat menggunakan model koalisi Policy Blind Coalitions Theory dengan mengedepankan pendekatan *office-seeking* untuk melakukan koalisi dengan KMP bersama Prabowo-Hatta, sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Model Koalisi Partai Golkar Tahun 2014

Menekankan prinsip ukuran dan jumlah kursi partai politik pada parlemen	Berkoalisi dengan Koalisi Merah Putih dengan partai-partai politik besar : Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS dan Partai Demokrat, dengan jumlah suara kursi di parlemen 353 atau 63%
Pendekatan berbasis <i>office-seeking</i> untuk memaksimalkan kekuasaan	Terlihat pada adanya bargaining Partai Golongan Karya, ketika berusaha menentukan koalisi ke KMP atau KIH. Pada saat ke KIH bertemu dengan Megawati, adanya penolakan bargaining. Kemudian, ketika ke KMP bertemu dengan Prabowo,

adanya kesepakatan bargaining yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Partai Golongan Karya, sebagai partai besar dan memiliki eksistensi yang besar dari periode ke periode, sehingga tidak menginginkan minimal bargaining untuk memaksimalkan kekuasaan dan kedudukan di pemerintahan

Loyalitas peserta koalisi sulit dijamin

Ketika hasil pemilihan presiden telah menentukan kemenangan pada Jokowi-JK dengan koalisi KIH, maka terjadinya perpindahan dan perubahan dukungan Partai Golongan Karya dari Prabowo dengan koalisi KMP ke Jokowi dengan koalisi KIH, untuk melanggengkan kekuasaan Partai Golongan Karya dalam pusaran pemerintahan, sehingga terjadilah bargaining Partai Golongan Karya dengan Jokowi pada tahun 2016 pasca MUNASLUB Partai Golongan Karya.



5.2 Konflik Internal dan Konsensus Partai Golongan Karya

5.2.1 Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya Tahun 2014 dan Awal Mula Terjadinya Konflik Internal

Partai Golkar di penghujung tahun 2014 menampilkan drama menarik, yaitu: diselenggarakannya dua MUNAS IX. MUNAS pertama diselenggarakan di Bali pada tanggal 30 November – 4 Desember 2014 yang menghasilkan keputusan bahwa Aburizal Bakrie kembali ditunjuk menjadi ketua umum secara aklamasi. Sedangkan, MUNAS kedua diselenggarakan di Ancol Jakarta pada tanggal 6-8 Desember 2014 dengan keputusan menolak hasil munas di Bali karena dinilai tidak sesuai AD/ART Partai Golkar di mana pemilihan ketua umum dipilih secara tidak demokratis. Perselisihan tersebut juga memunculkan dua kubu yang berseteru, yaitu: kubu MUNAS Bali yang diketuai oleh ARB itu sendiri, sementara kubu MUNAS Ancol Jakarta diketuai oleh Agung Laksono. Adanya perselisihan ditubuh Partai Golkar ini jika dikontekskan dengan teorinya Timothy J. Power sangat relevan. Hal ini dikarenakan, pertumbuhan dan perkembangan sistem multipartai melalui dua tahapan utama, dan Partai Golkar telah melewati tahap pertama sebagai tahap permulaan yang mana dihitung sejak reformasi yang rentang waktunya sudah melewati 5-10 tahun, kemudian Partai Golkar menempati tahapan kedua, yaitu: pelibatan pelembagaan partai dalam memperkuat partai itu sendiri³. Oleh karena itu, adanya konflik atau perbedaan pendapat di tubuh Partai Golkar merupakan salah satu dinamikanya.

³ Timothy J. Power, "Parties, Puppets, and Paradoxes: Chancing Attitudes Toward Party Institutionalization in Post-Authoritarian Brazil," *Jurnal Party Politics* Vol.3 (1997), hlm. 207-208

Partai Golkar yang kini berkonflik juga sebenarnya sedang dituntut untuk menyelesaikan permasalahan internalnya sendiri dan juga sedang diuji apakah mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelembagaan konflik. Artinya, pelembagaan konflik yang dimaksudkan adalah partai politik tidak terkecuali Partai Golkar merupakan wadah konflik, peserta konflik, dan bertugas menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, Partai Golkar dalam hal ini seharusnya mampu mengatur dan menyelesaikan konflik di dalam tubuhnya sendiri, baru kemudian bersaing dengan partai lain sebagai peserta konflik dengan fair, dan berusaha menyelesaikan konflik dalam masyarakat⁴.

Kekisruhan dalam Partai Golkar diawali oleh adanya perbedaan pendapat masing-masing elit Partai Golkar yang nampaknya ‘seolah-olah’ membuat Partai Golkar goyah dan menjurus kepada perpecahan. Terjadinya konflik tidak jauh berbeda dengan urusan kepengurusan atau jabatan tertinggi di Partai Golkar yang diperebutkan sebagai arena konflik. Nampaknya dalam proses penelitian ini, adanya konflik internal partai Golongan Karya disebabkan oleh :

1) Adanya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan dan konspirasi memenangkan Aburizal Bakrie

Konspirasi untuk memenangkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar terlihat jelas dalam beberapa dinamika yang terjadi menjelang Munas IX. Pertama, ada upaya dari beberapa pihak untuk memanipulasi dukungan dari DPD I di seluruh Indonesia. Misalnya, terdapat kesepakatan

⁴ Andy Ramses dan La Bakry (editor), Politik dan Pemerintahan Indonesia (Jakarta: MIPI, 2009), hlm. 140-141.

yang dikenal dengan "Kesepakatan Bali" yang ditandatangani oleh 27 DPD I, yang menyepakati beberapa hal untuk mendukung langkah Aburizal Bakrie. Di sisi lain, ada intimidasi yang dilakukan oleh pengurus DPP dan DPD terhadap kader dan pengurus yang tidak mendukung ARB. Kejadian ini ditegaskan dengan adanya laporan dari beberapa Ketua DPD II yang menjadi saksi atas tindakan intimidasi tersebut. Selain itu, konspirasi ini juga terungkap melalui pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh tokoh-tokoh partai, seperti Azis Syamsudin, yang menjelaskan pentingnya dukungan kepada Aburizal Bakrie dengan janji mengamankan masalah hukum bagi para ketua DPD I. Lebih jauh, rekaman pembicaraan yang bocor menunjukkan bagaimana ada rencana strategis untuk mengontrol forum dan menekan peserta untuk memberikan dukungan kepada Aburizal Bakrie. Nurdin Halid, sebagai Ketua SC Munas IX, memaparkan skenario untuk mengamankan dukungan dan mengancam peserta yang tidak sejalan dengan pilihan politik ARB. Semua ini menunjukkan bahwa ada usaha terorganisir dan terencana untuk menjaga kekuasaan Aburizal Bakrie meskipun ada kritik dan penolakan yang meluas

2) Penentuan jadwal MUNAS yang tidak sesuai dengan AD/ART

Penentuan jadwal Munas IX Partai Golkar menjadi salah satu isu kontroversial yang menyoroti dinamika internal partai. Awalnya, terdapat rencana untuk mengadakan Munas pada bulan Januari 2015. Namun, keputusan diubah untuk dilaksanakan pada tanggal 30 November 2014, melalui rapat pleno DPP pada 13 November 2014. Perubahan jadwal ini menyebabkan protes

dan kritik dari berbagai pihak di dalam partai. Pengambilan keputusan mengenai tanggal pelaksanaan MUNAS ini dianggap melanggar ketentuan yang ada, karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Sebagian besar DPD I Provinsi pada saat RAPIMNAS VII di Yogyakarta pada 18-20 November 2014 bersikukuh mendukung pelaksanaan Munas pada tanggal 30 November 2014 dan menyatakan dukungan mereka terhadap Aburizal Bakrie. Argumen mereka lebih berdasarkan pada keputusan mayoritas dukungan, bukan pada landasan hukum yang kuat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan keputusan tersebut, serta memberi gambaran tentang bagaimana pengaruh dan kekuasaan dapat mendominasi proses pengambilan keputusan di dalam partai. Pada akhirnya, keputusan untuk mengadakan Munas pada tanggal yang dipilih berlangsung meskipun terdapat banyak penolakan dan kritik, yang mencerminkan adanya praktik kesewenang-wenangan dalam proses tersebut dengan tujuan mempertahankan kekuasaan Aburizal Bakrie.

Penyebab konflik ini berdasarkan konsep dari Ramlan Surbakti, salah satunya adalah penyebab konflik yang didasarkan atas adanya struktur politik. Struktur politik ini merupakan penguasa politik dan beberapa orang yang dikuasai merupakan bagian dari struktur, di mana kedua tokoh tersebut merupakan objek dari kekuasaan politik. Baik Abu Rizal Bakrie maupun Agung Laksono, keduanya merupakan tokoh yang memiliki massa dan kader aktif dalam struktur organisasi di Partai Golongan Karya, dan memiliki kekuasaan

politik juga di pemerintahan. Keduanya bersitegang akibat dari perbedaan pendapat, dan disisi lain juga ARB telah menuaikan sinyal-sinyal untuk mempertahankan kekuasaan dengan metode yang tidak sesuai dengan aturan pada organisasi, yaitu Partai Golongan Karya. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa adanya konspirasi untuk memenangkan ARB pada MUNAS IX Partai Golongan Karya dan penentuan jadwal MUNAS yang tidak sesuai dengan AD/ART, menimbulkan ketidakpuasan bagi para kader terhadap kinerja dan kepemimpinan ARB dalam menentukan arah kekuasaan Partai Golongan Karya, baik di internal maupun eksternal partai.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Prof. Ganjar Razuni⁵ mengenai awal mula adanya konflik internal Partai Golkar berdasarkan penentuan waktu MUNAS yang tidak sesuai dengan AD/ART sebagai berikut :

“Konflik ini sebetulnya dimulai dari masalah tentang kapan diselenggarakannya Munas. Menurut AD/ART, Munas 2009 itu sudah dilaksanakan bulan Oktober tahun 2009. Karena masa jabatan DPP itu lima tahun, maka Munas harus sudah terselenggara setidaknya kalau tepat waktu, ya tentunya pada Oktober 2014. Sedangkan di Oktober 2014 itu, itu adalah banyak agenda politik nasional. Antara lain, pelantikan anggota DPR, MPR yang baru pada tanggal 1 Oktober. Kemudian pembentukan komisi-komisi di DPR RI. Pembentukan pimpinan DPR RI. Pokoknya AKD lah, Alat Kelengkapan Dewan itu pada 1 sampai 5 Oktober. Kemudian, sampai terpilihnya ketua DPR, dan seterusnya, hingga pada tanggal 20 Oktober adalah pelantikan presiden dan wakil presiden. Dan pada tanggal selambatnya, 27 atau 25 Oktober, itu sudah terbentuk kabinet baru. Itu adalah agenda-agenda politik yang yang berlangsung ya, di dalam bulan Oktober. Sedangkan menurut AD/RT, Munas itu seharusnya sudah terselenggara pada Oktober tahun 2014, tanggal 5. Sehingga disitu mulai muncul friksi-friksi kepentingan. Ada yang ingin memperpanjang Munas

⁵ Wawancara dengan Prof. Ganjar Razuni, selaku kader Partai Golongan Karya dan Sekretaris Dewan Pakar Partai Golongan Karya (2016-2019 dan 2019-2024) pada Senin, 3 Februari 2024 Pukul 11.00 WIB di Kantor DPP Partai Golongan Karya

masa jabatan DPP, ada yang ingin dua kali, dan seterusnya. Disitulah timbul konflik. Nah, itu yang pertama, Itu konflik secara teknis, organisasi dalam hal pelanggaran Munas, di mana tentu ada kepentingan-kepentingan politik di dalam itu semua menyambut agenda-agenda politik nasional pada bulan Oktober tersebut”

"Tim Penyelamat Partai Golkar" tidak secara eksplisit disebutkan oleh Tantowi Yahya, yang merupakan kubu ARB, tetapi tampaknya ada upaya untuk menyelamatkan dan memperkuat posisi Partai Golkar dalam menghadapi konflik internal dan ketidakpastian politik. Setelah terjadinya konflik pada tahun 2014, ada kebutuhan untuk menyusun langkah-langkah politik agar Partai Golkar tetap berfungsi dan bisa berpartisipasi dalam pemilihan yang akan datang, sebagaimana diungkapkan di . Dalam situasi tersebut, penyampaian kompromi dan dialog di antara kubu-kubu yang bertikai menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan partai, di mana bagian dari langkah-langkah tersebut melibatkan pembicaraan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Perlu diingat bahwa bagi Partai Golkar, upaya untuk tetap menjadi relevan dalam politik Indonesia sangat penting, terutama setelah pergeseran kekuasaan pasca pemilihan presiden, di mana Jamannya di bawah kepemimpinan Jokowi dianggap berkurang dibandingkan partai lain seperti PDIP . Orientasi ini menunjukkan bahwa ada skenario di mana "Tim Penyelamat" dapat merujuk kepada individu atau kelompok dalam partai yang bekerja untuk memulihkan kembali kekuatan dan pengaruh partai dalam kancah politik nasional.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Prof. Ganjar Razuni⁶ mengenai terbentuknya Tim Penyelamat Partai Golkar :

“Sehingga akhirnya terjadilah Munas Bali yang pertama yang pada saat Munas Bali pertama itu nampaknya Munas tidak bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada. Artinya para calon ketua umum yang ingin berkontestasi di Munas Bali yang pertama itu itu tidak bisa terlaksana. Bahkan mereka tidak bisa hadir, tidak bisa masuk ke dalam arena Munas”.

“Karena ada sejumlah tokoh yang tidak bisa diakomodir di dalam pelaksanaan Munas itu, tokoh ini kan bukan hanya tokoh, tokoh punya pengikutnya. Tidak sendiri, ada gerbongnya. Maka mereka kemudian mengambil langkah-langkah politik yaitu membentuk namanya Tim Penyelamat Partai Golkar. Tim Penyelamat Partai Golkar itu ketuanya Pak Agung Laksono. Salah satu tokohnya juga disitu adalah Zainuddin Amali. Dan ada sembilan itu. Saya tidak masuk di dalam tim itu. Nah, tetapi Tim Penyelamat inilah yang kemudian mengambil alih untuk menampung aspirasi yang tidak terwadahi di dalam Munas Bali. Kalau itu, maka Tim Penyelamat ini membuat Munas tersendiri, yaitu di Ancol, yang disebut Munas Ancol. Sehingga disana terpilihlah beberapa calon ketua umum yang tidak bisa ikut di Munas Bali, di Ancol bisa mengikuti kompetisi. Ada pemungutan suara dengan ranking suaranya. Jadi, termasuk Pak Agung. Tapi yang terbesar tentu Pak Agung. Agus Gumiwang juga ikut. Priobudi Santoso juga ikut. Ada suaranya disitu”

Namun demikian, kesadaran bahwa Partai Golkar juga merupakan lembaga konflik inilah yang belum muncul sehingga menghadirkan munas ganda dengan klaimnya masing-masing. Oleh karena itu, Partai Golkar belum menemukan titik temu ataupun konsensus di antara pelbagai kelompok/golongan yang memperjuangkan kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini konflik internal yang terjadi juga akibat dari aturan yang ditetapkan oleh AD/ART Partai Golkar itu

⁶ Wawancara dengan Prof. Ganjar Razuni, selaku kader Partai Golongan Karya dan Sekretaris Dewan Pakar Partai Golongan Karya (2016-2019 dan 2019-2024) pada Senin, 3 Februari 2024 Pukul 11.00 WIB di Kantor DPP Partai Golongan Karya

sendiri belum terlembaga dengan sempurna. Dengan kata lain, spekulasi yang kemudian berkembang adalah bagaimana suatu partai politik belum dapat menyelesaikan konflik internalnya hendak mengurus permasalahan/konflik di masyarakat yang begitu luas, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal.

5.2.2 Konsensus Konflik Dualisme Partai Golkar

Setidaknya kedua kubu yang berkonflik sudah memiliki iktikat baik untuk sesegera mungkin menyelesaikan konflik dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 23 Desember 2014. Di pihak ARB diwakili oleh M.S. Hidayat dan Sharif Cicip Sutardjo, sementara di kubu Agung Laksono diwakili oleh Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Andi Matalatta, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Ibnu Munzir. Dalam kesempatan tersebut dibahas tentang upaya rekonsiliasi yang dinilai sesuai visi dan misi Partai Golkar. Oleh karena itu apabila upaya initerus berlanjut bukan mustahil kedua kubu yang berbeda pendapat ini akan berdamai. Namun demikian, dalam pertemuan kedua yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Januari 2015 akan dibahas topik menarik terkait posisi Partai Golkar di KMP juga permasalahan RUU Pilkada yang sudah disahkan. Hal ini dikarenakan, kubu Agung Laksono disamping mengkritik pemilihan ARB yang tidak demokratis juga permasalahan posisi Golkar itu sendiri sehingga Partai Golkar 'seolah-olah' hendak meninggalkan KMP dengan alasan bahwa posisi Partai Golkar pascareformasi selalu berada di posisi koalisi dengan pemerintah.

Posisi Partai Golkar dalam koalisi ini dapat dikategorikan sebagai “*minimal winning coalition*” yang mana prinsip dasar dari koalisi ini adalah maksimalisasi kekuasaan atau sebanyak mungkin memperoleh kursi di parlemen dan mengabaikan partai yang tidak perlu. Oleh karena itu, koalisi Partai Golkar dalam KMP adalah dibentuk tanpa memperdulikan posisi partai dan idiologi yang dianutnya. Dengan kata lain, koalisi tersebut adalah wujud bagaimana partai politik hanya berkuat pada rebut kekuasaan dan apabila kalah jegal kekuasaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kinerja di parlemen justru sedikit menghambat kinerja pemerintahan sekarang hingga waktunya reses masih juga belum memberikan sumbangsi apa-apa sehingga kubu Agung merasa tidak nyaman dengan situasi semacam itu.



5.3 Faktor-Faktor Terjadinya Perubahan Dukungan Partai Golongan Karya dari Prabowo ke Jokowi Sebagai Dampak dari Konflik Internal

Terjadinya perubahan dukungan dan koalisi Partai Golongan Karya dari Prabowo ke Jokowi, merupakan salah satu dampak dari adanya konflik internal Partai Golongan Karya, sehingga menitikberatkan perlunya restrukturisasi partai dan partai seperti Golongan Karya pun harus tetap satu komando dengan pemimpin dan penguasa negara, yaitu Jokowi. Awal Berkoalisi dengan Prabowo Kedekatan Personal dan Sejarah Partai, sehingga Golkar memilih untuk mendukung Prabowo karena kedekatan personal dan sejarah panjang antara Prabowo dan Golkar. Prabowo pernah menjadi kader Golkar, dan ada relasi institusional yang kuat antara kedua pihak. Namun, setelah pemilihan, situasi politik mengalami perubahan yang mengharuskan Golkar untuk menyesuaikan diri. Setelah kemenangan Jokowi-JK, Golkar menyadari pentingnya berada dalam kekuasaan untuk memastikan perannya dalam politik. Dukungan kepada Jokowi menjadi langkah strategis untuk tetap memiliki akses dan pengaruh di pemerintahan, meskipun awalnya mendukung Prabowo. Konflik internal yang terjadi di Golkar juga memicu perlunya konsensus dan kolaborasi yang lebih besar dengan pemerintah yang baru. Dengan mendukung Jokowi, Golkar berharap dapat memperbaiki citra dan stabilitas parti yang telah tercoreng akibat konflik.

Seiring berkembangnya situasi politik setelah pemilu, akan ada tekanan untuk beradaptasi dengan koalisi yang ada. Bisa dilihat bahwa Golkar memutuskan untuk selalu berada dalam posisi yang kuat dan strategis dalam pemerintah, menunjukkan bahwa mereka bersedia mengubah dukungan untuk memastikan keberlangsungan

dan pengaruh mereka di pemerintahan. Golkar terlihat berusaha untuk tetap relevan dalam politik Indonesia, terutama mengamati bagaimana partai lain, seperti PDIP, mendapatkan kekuatan dan pengaruh yang lebih besar. Pemilihan untuk berpaling kepada Jokowi dapat juga dilihat sebagai langkah pragmatis untuk meminimalisir kerugian dalam hal dukungan politik.

Perubahan dukungan Partai Golongan Karya dari Prabowo ke Jokowi dikarenakan adanya Kedekatan Personal dan Kultural. Pada awalnya, Golkar mendukung Prabowo karena hubungan historis dan kedekatan personal yang lebih kuat. Namun, setelah hasil pemilihan, kedekatan personal dengan Jokowi, terutama melalui wakilnya, Jusuf Kalla (JK), menjadi lebih menonjol. Hal ini menyebabkan Golkar merasa lebih nyaman untuk berafiliasi dengan pemerintahan Jokowi yang baru. Kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 memaksa Golkar untuk mempertimbangkan kembali posisinya. Setelah melihat hasilnya, dukungan kepada Jokowi dinilai lebih strategis untuk mempertahankan posisi dan pengaruh Golkar dalam struktur pemerintahan yang baru. Golkar cenderung mengutamakan stabilitas dan visi jangka panjang dalam politik. Dengan berkoalisi dengan Jokowi, Golkar berupaya memastikan bahwa mereka tetap memiliki akses dan pengaruh dalam pengambilan keputusan politik, meskipun mereka awalnya mendukung lawan politik Jokowi. Suasana politik di dalam Golkar sendiri mengalami perubahan. Pertikaian internal dan kebutuhan untuk menyatukan suara di dalam partai mendorong Golkar untuk mendukung pemerintahan yang sudah terpilih, demi menjaga citra dan koherensi partai. Partai Golkar berambisi untuk tetap relevan di panggung politik nasional. Keputusan untuk mendukung Jokowi lebih

dianggap sebagai langkah pragmatis untuk menciptakan peluang dalam mendapatkan posisi yang strategis di pemerintahan serta untuk memenuhi aspirasi anggota partai yang ingin berpartisipasi dalam kekuasaan.

Dapat diuraikan bahwa faktor-faktor yang mendukung perubahan dukungan Partai Golongan Karya dari Prabowo ke Jokowi, sebagai berikut :

1. Perbedaan sikap politik di internal Partai Golongan Karya

Terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan di antara anggota partai yang menyebabkan ketidakpuasan terhadap keputusan awal untuk mendukung Prabowo. Hal ini memicu konflik internal yang dimana Sebagian kader Golkar memilih untuk mendukung Jokowi-JK, yang didalam pasangan ini JK masih merupakan tokoh Golkar yang memiliki pengaruh besar.

2. Situasi Politik Pasca-Pilpres

Pasca Pilpres dan pasca MUNASLUB Partai Golkar pada tahun 2016, dan dengan terpilihnya Setya Novanto pada MUNASLUB tersebut sebagai Ketua Umum Partai Golkar, hasil MUNASLUB juga memberikan sikap politik Partai Golkar bahwa mendukung penuh pemerintahan Jokowi-JK dan berkoalisi dengan KIH. Disisi lain, Jokowi Ds sebagai pemenang Pilpres, menjadi dorongan kuat bagi Golkar untuk menyesuaikan diri dan mencari posisi strategis dalam pemerintahan baru dan mengamankan peran dan pengaruh Partai Golkar dalam kekuasaan pemerintahan.

3. **Konsensus Internal Partai Golongan Karya**

Proses konsensus di dalam partai setelah hasil Munaslub 2016 mendukung Jokowi sebagai calon presiden untuk pilpres 2019, menunjukkan bahwa partai memilih untuk bersikap proaktif dalam pemerintahan saat itu. Hal ini mencerminkan upaya partai untuk memperkuat posisinya dan menjalin hubungan baik dengan pemerintahan yang sedang berkuasa.

4. **Keinginan untuk Memaksimalkan Kebijakan**

Terdapat pandangan bahwa Golkar lebih memfokuskan diri pada keberlanjutan kebijakan untuk masyarakat daripada sekadar mengejar kekuasaan. Hal ini mendorong mereka untuk menjalin hubungan dengan pemerintah Jokowi yang dianggap lebih sejalan dengan tujuan partai

